



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2008-2009
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan POM.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 15 Desember 2008
Pukul	: 10.00 WIB s.d. selesai
Acara	: 1. Membicarakan hasil Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008-2009; 2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas bidang Badan POM. 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	: dr. Umar Wahid Hasjim/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	: 37 Anggota dari 49 Anggota Komisi IX DPR RI, 13 Anggota ijin, 1 Anggota sakit.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dibuka pukul 10.20 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

Paparan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang masalah-masalah aktual di bidang pengawasan obat dan makanan, hasil pengawasan obat dan makanan, jawaban atas pertanyaan tertulis Komisi IX DPR-RI dan lain-lain.

III. KESIMPULAN

Setelah menerima masukan/tanggapan Anggota serta jawaban Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada hari ini mengambil kesimpulan/keputusan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI menghargai kinerja Badan POM dalam beberapa bulan terakhir ini dan mendesak Badan POM untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk barang impor yang tidak hanya mengandung zat kimia yang berbahaya tetapi juga mengandung babi.
2. Komisi IX DPR RI mendorong Badan POM untuk mensosialisasikan komposisi dan efektivitas obat tradisional serta efek samping obat tradisional yang tidak memenuhi syarat agar pengetahuan masyarakat bertambah dan dapat memilih apa yang aman bagi diri mereka sehingga masyarakat terlindungi.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM agar semua obat baik obat yang dapat dibeli dengan resep atau tanpa resep mencantumkan HET (Harga Eceran Tertinggi) sampai kemasan yang siap pakai yang diterima oleh konsumen.
4. Komisi IX DPR RI menyampaikan kekecewaan terhadap penegakkan hukum pelanggaran obat dan makanan yang belum berpihak kepada keselamatan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan POM dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, Komisi IX DPR RI mengusulkan agar dilakukan RDP dengan Kejaksaan Agung RI.

Rapat ditutup pukul 12.15. WIB

Mr KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Dr. HUSNIAH RUBIANA THAMRIN AKIB, MS, Mkes, SpFK

Jakarta, 15 Desember 2008
PIMPINAN KOMISI IX DPR
WAKIL KETUA,

dr. UMAR WAHID HASJIM, Sp.P